

Evaluasi Pencapaian dan Metode Penetapan Target Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Banten Tahun 2015 – 2019

Cepi Safrul Alam

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Banten
Jl. Raya Karang Tanjung KM 4 Pandeglang
Email : cepiawiwulung@gmail.com

ARTICLE INFO

ABSTRAK / ABSTRACT

Article History:

Received: May 21, 2020

Revised: June 23, 2020

Accepted: June 26, 2020

Kata Kunci:

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Keywords:

Original Revenue (PAD), Motor Vehicle Revenue Fees (BBNKB), Motorized Vehicle Tax (PKB)

Bea Balik Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memberikan kontribusi terbesar pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Banten 2019. Kedua jenis penerimaan ini dihasilkan oleh Badan Pendapatan Provinsi Banten yang memiliki 11 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Banten. Meski memberikan kontribusi yang besar ternyata BBNKB tidak memenuhi target realisasi seperti PKB. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui capaian target BBNKB setiap UPT dan bagaimana metode penetapan yang digunakannya dan mengapa capaian target BBNKB lebih rendah dari PKB. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dari Miles dan Huberman. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi dan wawancara, sedangkan data target dan realisasi penerimaan menggunakan data dari tahun 2015 sampai dengan 2019. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa hanya ada 2 UPT yang terus mencapai target dan pada tahun 2019 terdapat 4 UPT yang tidak mencapai target. Kemudian, belum ada metode penetapan BBNKB yang secara khusus digunakan oleh UPT dan terdapat faktor lain yang menyebabkan rendahnya capaian target BBNKB dibanding PKB selain LPE dan PDRB. Rekomendasi yang penulis sampaikan ada dua, yaitu: Pertama, merumuskan metode penetapan BBNKB tiap UPT sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya masing-masing. Kedua, melakukan penelitian lebih lanjut terhadap UPT yang tidak mencapai target pada tahun 2019 yang semuanya berada di wilayah Poldo Metro Jaya.

Motor Vehicle Revenue Fees (BBNKB) and Motorized Vehicle Tax (PKB) make the greatest contributions to the 2019 Banten Province Original Revenue (PAD). Both types of revenue are generated by the Banten Province Revenue Agency which has 11 Technical Implementation Units (UPT) which scattered in the regencies and cities of Banten Province. Despite the large contribution, BBNKB did not meet the realization target like PKB. The purpose of this study was to determine the achievement of BBNKB revenue targets for each UPT and to find out the target setting method used and the causes of achieving BBNKB targets lower than PKB. This study uses a qualitative approach from Miles and Huberman. The data collection technique was carried out with documentation and interview studies, while the target data and revenue realization used data from 2015 to 2019. From the results of this study it was found that there were only 2 UPTs that continued to reach the target and in 2019 there were 4 UPTs that did not reach target. Then, there is no BBNKB determination method specifically used by UPT and there are other factors that cause the BBNKB target to be lower compared to PKB besides LPE and GRDP. The recommendations that the authors convey are twofold, namely: First, formulating the BBNKB determination method for each UPT in accordance with the factors that influence each. Second, conduct further research on UPT that did not reach the target in 2019, all of which are located in the Greater Jakarta Metropolitan Area.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Pendahuluan

Besaran anggaran belanja daerah dalam APBD merupakan besaran biaya yang dianggarkan untuk membiayai kebutuhan pelayanan publik, pembangunan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pembelanjaan ini dapat direalisasikan jika terpenuhinya anggaran pendapatan daerah. Semakin besar dana yang dimiliki daerah maka semakin besar anggaran belanja yang dibutuhkan dapat dipenuhi.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terdapat tiga sumber pendapatan yang dimiliki daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dari ketiga sumber pendapatan daerah tersebut yang berpengaruh langsung terhadap kemandirian daerah untuk menopang penyelenggaraan pemerintah daerah adalah PAD. Oleh karena itu pemerintah daerah harus berupaya untuk terus meningkatkan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar segala kebutuhannya terpenuhi dan tidak terlalu tergantung kepada dana perimbangan dari pemerintah pusat.

PAD yang menjadi kewenangan provinsi menurut Undang-undang 33 tahun 2004 tersebut meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Lain-lain PAD yang sah. Lebih lanjut berdasar pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat lima jenis pajak daerah yang dimiliki provinsi, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.

Dari kelima jenis pajak yang dimiliki provinsi, yang memberikan kontribusi terbesar kepada PAD di Provinsi Banten berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Tahun 2019 dari total PAD sebesar Rp. 7.344.821.272.800 PKB dan BBNKB berkontribusi sebesar Rp. 5.220.773.283.750 (71%).

BBNKB dan PKB meskipun menjadi kontributor terbesar pada PAD masing-masing memiliki pencapaian target yang berbeda dimana Provinsi Banten, dilihat dari realisasi penerimaan kedua sumber penerimaan ini ternyata berbeda pada tahun 2019, dimana BBNKB tidak mencapai target bahkan turun dari tahun 2018 sedangkan PKB tetap mencapai target. Pencapaian target BBNKB Bapenda Provinsi Banten ini berasal dari pencapaian target 11 UPT dengan target penerimaan masing-masing.

Tabel 1. Target dan realisasi penerimaan PKB dan BBNKB Provinsi Banten tahun 2018.

Jenis Penerimaan	Target dan Realisasi		
	Target	Realisasi	Persentase (%)
PKB	2.225.683.440.000	2.333.694.443.725	104,85
BBNKB	2.115.899.280.000	2.136.697.277.400	100,98

Sumber : Badan Pendapatan Provinsi Banten

Tabel 2. Target dan realisasi penerimaan PKB dan BBNKB Provinsi Banten tahun 2019.

Jenis Penerimaan	Target dan Realisasi		
	Target	Realisasi	Persentase (%)
PKB	2.677.747.900.000	2.855.717.313.050	106,65
BBNKB	2.402.207.100.000	2.365.632.737.300	98,48

Sumber : Badan Pendapatan Provinsi Banten

Pada tahun 2019 Surat Ketetapan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Nomor : 973/067/Kep-BAPENDA/2019) target kedua jenis penerimaan ini mengalami kenaikan, dimana target BBNKB naik sebesar 16,57%. Kenaikan ini mengacu kepada beberapa asumsi di antaranya, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Provinsi Banten Sebesar 6% pada tahun 2020; dan Peningkatan Pajak Daerah Sebesar 11,20% terdiri dari LPE 6% dan Kinerja Bapenda Provinsi Banten Sebesar 5,20%.

Oleh karena sangat signifikannya kontribusi dari BBNKB terhadap PAD dan juga menjadi dasar bagi hasil penerimaan PKB dan BBNKB Pemerintah Provinsi kepada daerah sebesar 30%, maka perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui kondisi yang terjadi sebagai bahan masukan untuk pengambil kebijakan pada pemungutan BBNKB tahun berikutnya.

Tabel 3. Target penerimaan PKB dan BBNKB Provinsi Banten tahun 2020.

Jenis Penerimaan	Target Penerimaan Tahun 2019 dan 2020			
	Target 2019	Target 2020	Selisih	Persentase (%)
PKB	2.677.747.900.000	3.348.57.000.000	670.309.100.000	25,03
BBNKB	2.402.207.100.000	2.800.309.000.000	398.101.900.000	16,57

Sumber : Badan Pendapatan Provinsi Banten

Masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pencapaian target BBNKB tiap UPT di Provinsi Banten ?
2. Adakah metode tertentu yang digunakan untuk penetapan target BBNKB ?
3. Mengapa pencapaian target BBNKB lebih rendah dibanding PKB ?

Pada penelitian yang dilakukan oleh Rosalina (2008) yang berjudul Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Setelah Otonomi Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintahan Kepulauan Riau), demikian juga dengan Anggraini (2010) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Empiris pada Provinsi Bengkulu), Sari (2013) dengan judul Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah (Studi Kasus pada DPPAD Provinsi Jawa Tengah), Mokoginta (2015) diketahui bahwa PAD dari lokus penelitian kontribusi terbesar adalah dari PKB dan BBNKB, dan disebutkan pula capaian realisasi penerimaan yang PKB dan BBNKB yang mencapai target, namun pada penelitian ini tidak disebutkan kontribusi penerimaan dari tiap-tiap daerah/wilayah kerja, sehingga tidak diketahui daerah mana saja yang memberikan kontribusi dari yang paling kecil sampai dengan yang paling besar. Inilah yang menjadi pembeda dengan penelitian yang penulis lakukan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pencapaian target BBNKB setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019
2. Mengetahui Metode penetapan Target BBNKB yang digunakan setiap UPT
3. Mengetahui penyebab pencapaian target BBNKB lebih rendah dibanding PKB

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

- a. Manfaat teoritis, yaitu dapat dijadikan salah satu rujukan pada penelitian yang serupa atau untuk dikembangkan lagi pada penelitian lanjutannya.
- b. Manfaat praktis, yaitu dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan dalam rangka peningkatan penerimaan daerah yang bersumber dari BBNKB.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan Pendekatan kualitatif dari Miles dan Huberman (1983) dengan prosedur data collection, data reduction, data display dan conclusion. Data diambil dari sumber data primer, yaitu dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten. Adapun teknik pengambilan data dilakukan dengan studi dokumentasi dan wawancara. Studi dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data target dan penerimaan BBNKB setiap UPT dari tahun 2015 sampai dengan 2019, sedangkan wawancara dilakukan untuk mendapatkan data mengenai metode penetapan dan penyebab ketidak tercapaian target BBNKB dibanding PKB. Wawancara ini dilakukan dengan Kepala bidang Pendapatan dan Kepala Sub. Bidang Perencanaan, pendataan dan pengembangan potensi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten, serta salah satu pejabat pada setiap UPT.

Hasil dan Pembahasan

Capaian Target dan Realisasi Penerimaan BBNKB Tiap UPT

Capaian Target dan Realisasi Penerimaan BBNKB Pada UPT Cikande

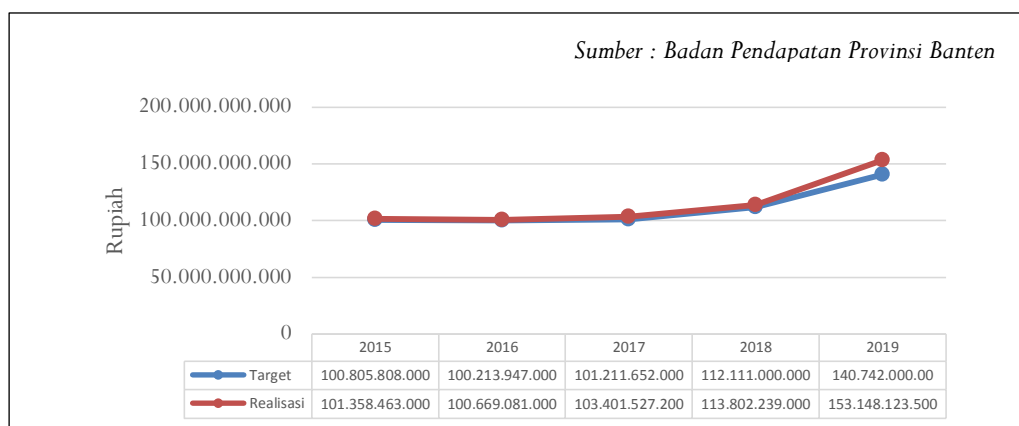
Realisasi penerimaan BBNKB pada UPT Cikande dari tahun 2015 sampai dengan 2019 selalu mencapai target dengan persentase realisasi berada dikisaran 100,55% sampai dengan 108,81% meskipun terjadi penurunan target pada tahun 2016. Jumlah penerimaan BBNKB menunjukkan tren yang positif mulai dari tahun 2017 dimana terdapat kenaikan penerimaan sebesar Rp. 2.732.446.200 (2,71%) dari tahun 2016, kemudian tahun 2018 meningkat lagi sebesar Rp. 10.400.711.800 (10,33%) dan pada tahun 2019 meningkat lebih tajam lagi yaitu sebesar Rp. sebesar 39.345.884.500 (34,57%). Adapun jumlah penerimaan BBNKB terendah berada

ditahun 2017 yaitu Rp. 100.669.081.000 dan jumlah penerimaan yang tertinggi berada ditahun 2019 yaitu sebesar Rp. 153.148.123.500.

Tabel 4. Target dan realisasi BBNKB IPT Cikande.

Tahun	Target	Realisasi	%
2015	100,805,808,000	101,358,463,000	100.55
2016	100,213,947,000	100,669,081,000	100.45
2017	101,211,652,000	103,401,527,200	102.16
2018	112,111,000,000	113,802,239,000	101.51
2019	140,742,000,000	153,148,123,500	108.81

Sumber : Badan Pendapatan Provinsi Banten



Gambar 1. Target dan realisasi penerimaan BBNKB IPT Cikande tahun 2015 s.d. 2019.

Merujuk pada pendapat Halim (2004) bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah itu disebut sebagai efektivitas. Kemudian, Mardiasmo (2009) mengatakan bahwa apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Sementara Siagian (2014) memberikan kriteria efektivitas berdasarkan skala pengukuran sebagai berikut: 1. (90 – 100) Sangat Efektif, 2. (80 – 89) Efektif, 3. (70 – 79) Cukup Efektif, 4.(60 – 69) Kurang Efektif, dan 5. (0 – 59) Tidak efektif. Maka, berdasarkan kriteria efektivitas tersebut realisasi penerimaan BBNKB pada IPT Cikande dikategorikan sangat efektif.

Capaian Target dan Realisasi Penerimaan BBNKB Pada IPT Kota Serang

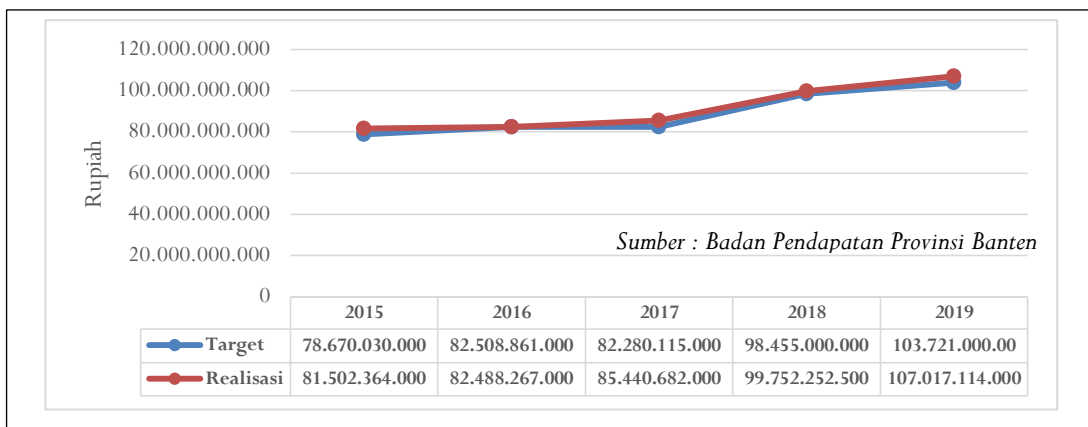
Realisasi penerimaan di IPT Kota Serang dari tahun 2015 sampai dengan 2019 hampir seluruhnya mencapai target. Persentase realisasi penerimaan berada dikisaran 99,98% sampai dengan 103,60%, ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan BBNKB di IPT Kota Serang sangat efektif. Pada tahun 2016 memang target tercapai sebesar 99,98% namun jumlah penerimaan sebenarnya mengalami kenaikan sebesar Rp. 985.903.000 (1,21%) dari tahun 2015.

Tabel 5. Target dan realisasi BBNKB IPT Kota Serang tahun 2005 s.d. 2019.

Tahun	Target	Realisasi	%
2015	78.670.030.000	81.502.364.000	103,60
2016	82.508.861.000	82.488.267.000	99,98
2017	82.280.115.000	85.440.682.000	103,84
2018	98.455.000.000	99.752.252.500	101,32
2019	103.721.000.000	107.017.114.000	103,18

Sumber : Badan Pendapatan Provinsi Banten

Realisasi penerimaan yang terendah berada ditahun 2015 yaitu sebesar Rp. 81.502.364.000, sedangkan realisasi penerimaan yang paling tinggi berada pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 107.017.114.000. Jumlah realisasi penerimaan BBNKB di UPT Kota Serang dari tahun 2015 sampai dengan 2019 terus mengalami kenaikan yang positif, dimana pada tahun 2016 terjadi kenaikan penerimaan sebesar Rp. 985.903.000(1,21%), pada tahun 2017 naik lagi sebesar Rp. 2.952.415.000 (3,58%), kemudian pada tahun 2018 terjadi kenaikan paling tinggi yaitu sebesar Rp. 14.311.570.500 (16,75%), sedangkan pada tahun 2019 terjadi kenaikan sebesar Rp.3.296.114.000 (3,18%).



Gambar 2. Target dan realisasi penerimaan BBNKB UPT Kota Serang tahun 2015 s.d. 2019.

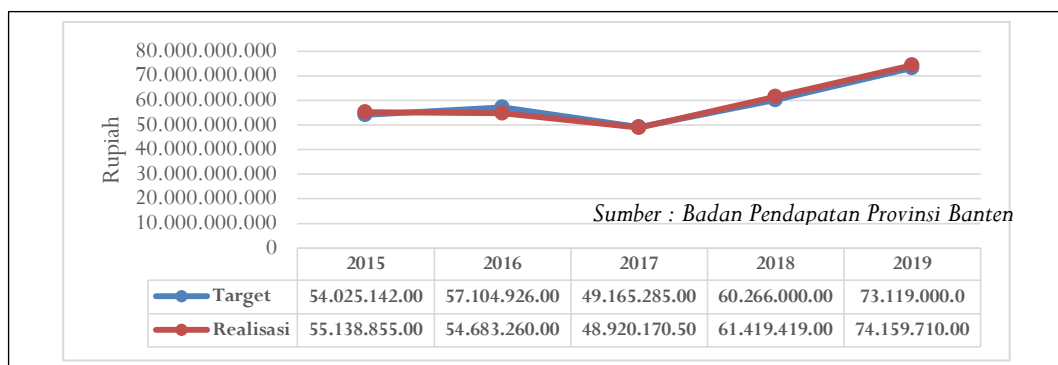
Capaian Target dan Realisasi Penerimaan BBNKB Pada UPT Pandeglang

Realisasi penerimaan BBNKB di UPT Pandeglang pada tahun 2016 dan 2017 tidak mencapai target yaitu masing-masing sebesar 95,76% dan 99,50%, namun demikian realisasi penerimaan tersebut masih dikategorikan sangat efektif. Penurunan realisasi target pada UPT Pandeglang ternyata sekaligus juga menggambarkan penurunan penerimaan BBNKB, dimana pada tahun 2016 terjadi penurunan sebesar Rp. 455.595.000 (0,83%) dan pada tahun 2017 terjadi penurunan yang lebih tinggi yaitu sebesar Rp. 5.763.089.500 (10,54%) padahal pada tahun tersebut terjadi pula penurunan target.

Tabel 6. Target dan realisasi BBNKB UPT Pandeglang tahun 2015 s.d 2019.

Tahun	Target	Realisasi	%
2015	54.025.142.000	55.138.855.000	102,06
2016	57.104.926.000	54.683.260.000	95,76
2017	49.165.285.000	48.920.170.500	99,50
2018	60.266.000.000	61.419.419.000	101,91
2019	73.119.000.000	74.159.710.000	101,42

Sumber : Badan Pendapatan Provinsi Banten



Gambar 3. Target dan realisasi penerimaan BBNKB UPT Pandeglang tahun 2015 s.d. 2019.

Peningkatan penerimaan baru terlihat pada tahun 2018 dimana terjadi kenaikan sebesar Rp. 12.499.248.500 (25,55%) dan tahun 2019 naik lagi sebesar Rp. 12.740.291.000 (20,74%). Realisasi penerimaan terendah berada pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 48.920.170.500, kemudian realisasi penerimaan tertinggi berada ditahun 2019 yaitu sebesar Rp. 74.159.710.000.

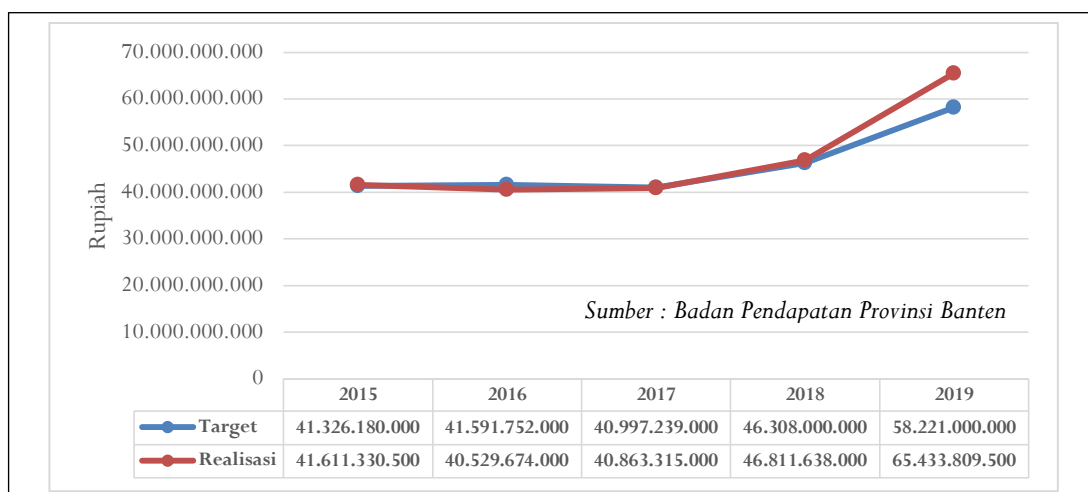
3.1.4. Capaian Target dan Realisasi Penerimaan BBNKB Pada UPT Rangkasbitung

Pada penerimaan BBNKB di UPT Rangkasbitung terdapat realisasi yang tidak mencapai target tapi masih dalam katagori sangat efektif yaitu tahun 2016 dan 2017. Ketidak tercapaian target ini juga ada yang diikuti dengan penurunan realisasi penerimaan yaitu sebesar Rp.1,081,656,500 (2,60%) pada tahun 2016 yang sekaligus juga menjadi penerimaan yang terendah yaitu sebesar Rp. 40,529,674,000, sedangkan penerimaan tertinggi sebesar Rp. 65,433,809,500 berada pada tahun 2019.

Tabel 7. Target dan realisasi BBNKB UPT Rangkasbitung Tahun 2015 s.d 2019.

Tahun	Target	Realisasi	%
2015	41,326,180,000	41,611,330,500	100.69
2016	41,591,752,000	40,529,674,000	97.45
2017	40,997,239,000	40,863,315,000	99.67
2018	46,308,000,000	46,811,638,000	101.09
2019	58,221,000,000	65,433,809,500	112.39

Sumber : Badan Pendapatan Provinsi Banten



Gambar 4. Target dan Realisasi Penerimaan BBNKB UPT Rangkasbitung Tahun 2015 s.d. 2019.

Kenaikan penerimaan mulai terjadi lagi sejak tahun 2017,kenaikan pertama tahun 2017 sebesar Rp. 333.641.000 (0,82%), kemudian meloncat naik tahun 2018 sebesar Rp. 5.948.323.000 (14,56%) dan pada tahun 2019 meloncat lagi naik sebesar Rp. 18.622.171.500 (39,78%).

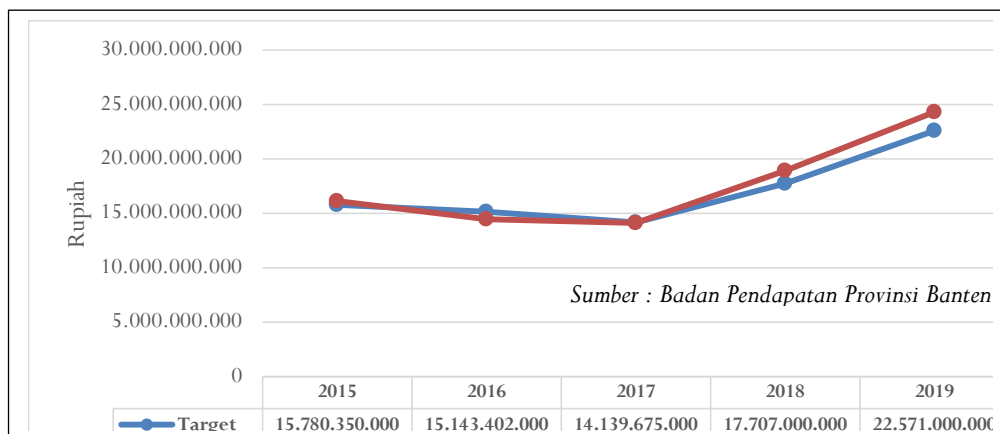
Capaian Target dan Realisasi Penerimaan BBNKB Pada UPT Malingping

Realisasi penerimaan BBNKB di UPT Malingping hampir sama dengan realisasi penerimaan di UPT Pandeglang, efektivitas realisasi penerimaannya berada dalam katagori sangat efektif. Terdapat ketidak tercapaian target yang diikuti dengan penurunan penerimaan yaitu pada tahun 2016 terjadi penurunan penerimaan sebesar Rp. 1.706.644.000 (10,58%) dan pada tahun 2017 terjadi penurunan penerimaan sebesar Rp.344.407.000 (2,39%).

Tabel 8. Target dan Realisasi BBNKB UPT Malingping Tahun 2015 s.d 2019.

Tahun	Target	Realisasi	%
2015	15.780.350.000	16.130.459.000	102,22
2016	15.143.402.000	14.423.815.000	95,25
2017	14.139.675.000	14.079.408.000	99,57
2018	17.707.000.000	18.881.690.000	106,63
2019	22.571.000.000	24.269.680.000	107,53

Sumber : Badan Pendapatan Provinsi Banten



Gambar 5. Target dan realisasi penerimaan BBNKB UPT Malingping tahun 2015 s.d. 2019.

Realisasi penerimaan mulai naik tahun pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 4.802.282.000 (34,11%) dan pada tahun 2019 naik sebesar Rp. 5.387.990.000 (28,54%). Adapun penerimaan terendah terjadi pada tahun 2017 sebesar Rp. 14.079.408.000 dan yang tertinggi pada tahun 2019 sebesar Rp. 24.269.680.000.

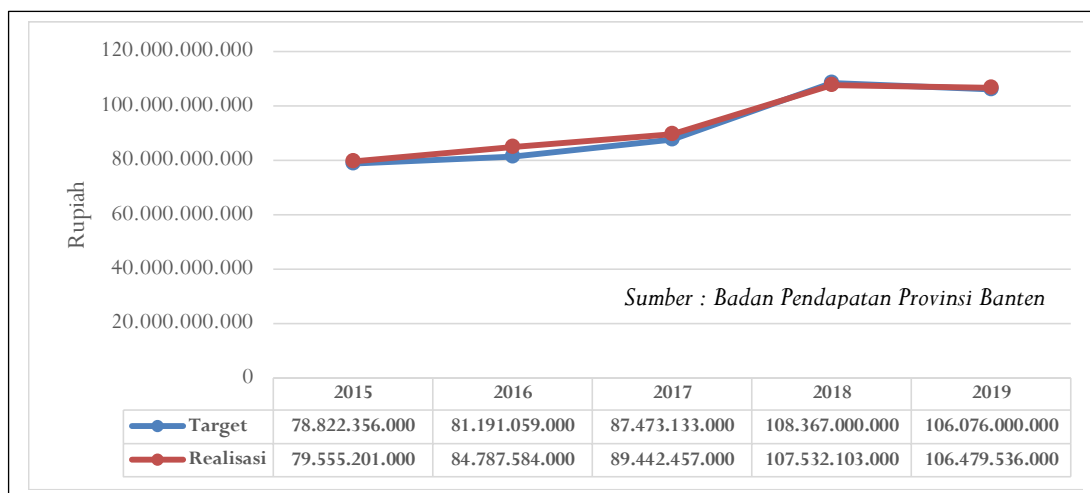
Capaian Target dan Realisasi Penerimaan BBNKB Pada UPT Cilegon

Realisasi penerimaan di UPT Cilegon dari tahun 2015 sampai dengan 2019 hampir seluruhnya mencapai target. Hanya pada tahun 2018 persentase realisasi penerimaannya sebesar 99,23%. Secara keseluruhan realisasi penerimaan BBNKB sangat efektif. Meski tidak mencapai target di tahun 2018, pada tahun tersebut justru terjadi kenaikan yang paling tinggi, yaitu sebesar Rp. 18.089.646.000 (20,22%). Berbanding terbalik dengan penerimaan tahun 2018, pada tahun 2019 meski melampaui target (100,38%) sebenarnya jumlah penerimaan menurun sebesar Rp. 1.052.567.000 (0,98%).

Tabel 9. Target dan realisasi BBNKB UPT Cilegon tahun 2015 s.d 2019.

Tahun	Target	Realisasi	%
2015	78.822.356.000	79.555.201.000	100,93
2016	81.191.059.000	84.787.584.000	104,43
2017	87.473.133.000	89.442.457.000	102,25
2018	108.367.000.000	107.532.103.000	99,23
2019	106.076.000.000	106.479.536.000	100,38

Sumber : Badan Pendapatan Provinsi Banten



Gambar 6. Target dan realisasi penerimaan BBNKB UPT Cilegon tahun 2015 s.d. 2019.

Seperti yang terlihat pada Gambar 6, realisasi penerimaan terendah berada ditahun 2015 sebesar Rp. 78.822.356.000 dan tertinggi pada tahun 2018 sebesar Rp. 107,532,103,000.

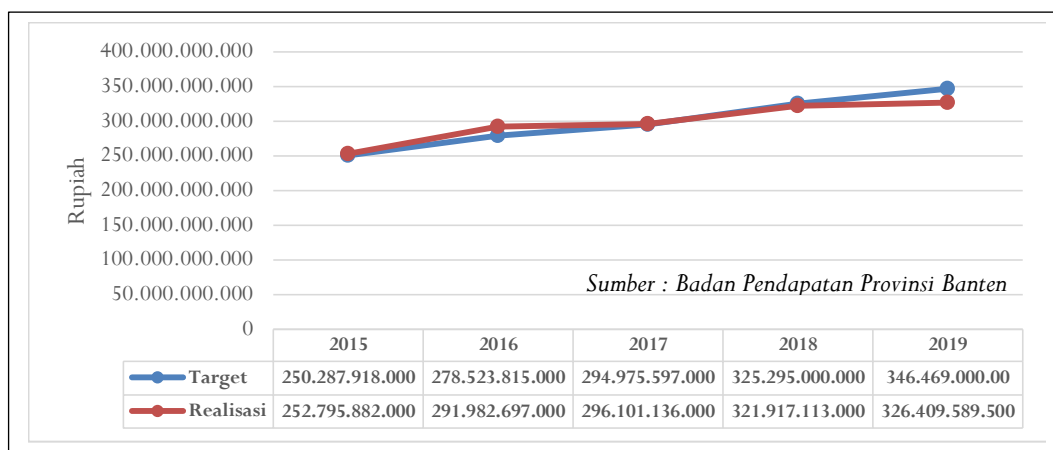
Capaian Target dan Realisasi Penerimaan BBNKB Pada UPT Cikokol

Persentase Realisasi penerimaan BBNKB UPT Cikokol hampir sama dengan UPT Kota Serang, realisasi penerimaannya sangat efektif, meski ada yang tidak memenuhi target namun dari tahun-ke tahun mengalami peningkatan penerimaan, dan peningkatan penerimaan terbesar berada pada tahun 2016 yaitu meningkat sebesar Rp. 39,186,815,000 (15,50%), dan kenaikan terbesar kedua berada di tahun 2018 yaitu kenaikan sebesar Rp. 25,815,977,000 (8,72%), padahal tahun 2018 ini persentase realisasi targetnya 98,96%. Realisasi penerimaan terendah berada pada tahun 2015 sebesar Rp. 252,795,882,000 dan tertinggi berada pada tahun 2019 sebesar Rp. 326,409,589,500.

Tabel 10. Target dan realisasi BBNKB UPT Cikokol tahun 2015 s.d 2019.

Tahun	Target	Realisasi	%
2015	250,287,918,000	252,795,882,000	101.00
2016	278,523,815,000	291,982,697,000	104.83
2017	294,975,597,000	296,101,136,000	100.38
2018	325,295,000,000	321,917,113,000	98.96
2019	46,469,000,000	326,409,589,500	94.21

Sumber : Badan Pendapatan Provinsi Banten



Gambar 7. Target dan realisasi penerimaan BBNKB UPT Cikokol tahun 2015 s.d. 2019.

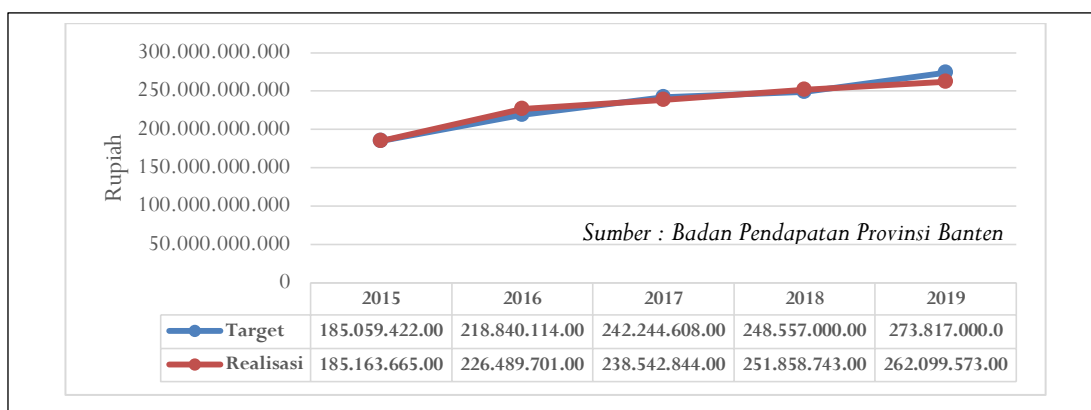
Capaian Target dan Realisasi Penerimaan BBNKB Pada UPT Ciledug

Persentase realisasi penerimaan BBNKB UPT Ciledug sama seperti UPT Kota Serang dan Cikokol meski terdapat persentase dibawah target, kenaikan penerimaan terjadi setiap tahun dan realisasi penerimaan juga berada dalam kategori sangat efektif kisaran antara 95,72% sampai dengan 103,50%.

Tabel 11. Target dan realisasi BBNKB UPT Ciledug tahun 2015 s.d 2019.

Tahun	Target	Realisasi	%
2015	185,059,422,000	185,163,665,000	100.06
2016	218,840,114,000	226,489,701,000	103.50
2017	242,244,608,000	238,542,844,000	98.47
2018	248,557,000,000	251,858,743,000	101.33
2019	273,817,000,000	262,099,573,000	95.72

Sumber : Badan Pendapatan Provinsi Banten



Gambar 8. Target dan realisasi penerimaan BBNKB UPT Ciledug tahun 2015 s.d. 2019.

Jumlah penerimaan terendah berada pada tahun 2015 sebesar Rp. 185,163,665,000 dan tertinggi pada tahun 2019 sebesar Rp. 262,099,573,000. Adapun jumlah kenaikan terbesar berada di tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 41,326,036,000.00 (22,32%), sedangkan tahun berikutnya kenaikannya berada dikisaran 10 M sampai dengan 13 M, sekitar kurang lebih 5%.

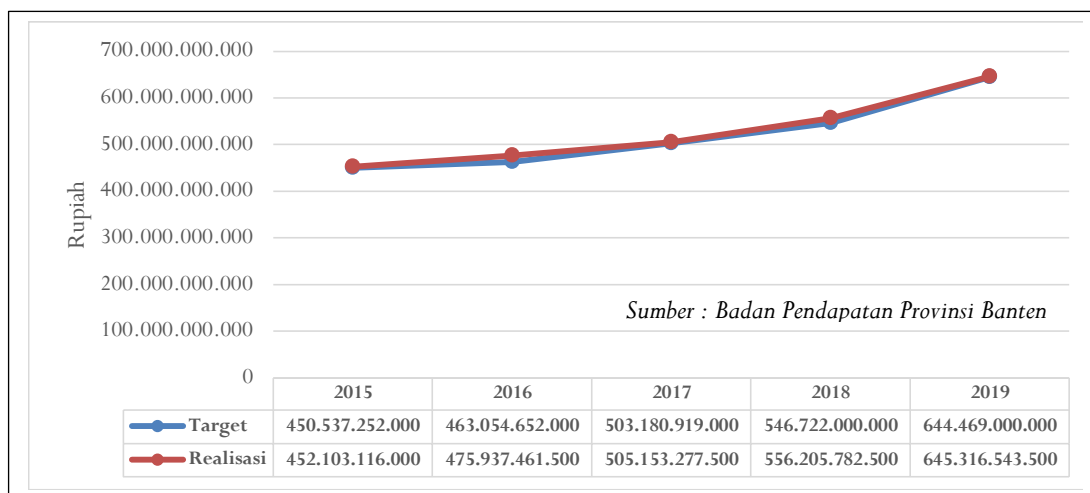
Capaian Target dan Realisasi Penerimaan BBNKB Pada UPT Balaraja

Persentase penerimaan BBNKB UPT Balaraja hampir sama dengan Persentase penerimaan UPT Cikande, semua berada diatas 100%, berbedaannya terdapat pada jumlah realisasi penerimaan yang sangat signifikan, dimana UPT Balaraja penerimaan terendahnya sebesar Rp. 452,103,116,000 pada tahun 2015 dan penerimaan tertingginya sebesar Rp. 645,316,543,500 pada tahun 2019. Adapun jumlah kenaikan tertinggi sebesar Rp.89,110,761,000 (16,02%), kedua tahun 2018 kenaikan sebesar Rp. 51,052,505,000 (10,11%), ketiga tahun 2017 kenaikan sebesar Rp. 29,215,816,000.00 (6,14%) dan yang terakhir tahun 2016 kenaikan sebesar Rp. 23,834,345,500 (5,27%).

Tabel 12. Target dan realisasi BBNKB UPT Balaraja tahun 2015 s.d 2019.

Tahun	Target	Realisasi	%
2015	450,537,252,000	452,103,116,000	100.35
2016	463,054,652,000	475,937,461,500	102.78
2017	503,180,919,000	505,153,277,500	100.39
2018	546,722,000,000	556,205,782,500	101.73
2019	644,469,000,000	645,316,543,500	100.13

Sumber : Badan Pendapatan Provinsi Banten



Gambar 9. Target dan realisasi penerimaan BBNKB UPT Balaraja tahun 2015 s.d. 2019.

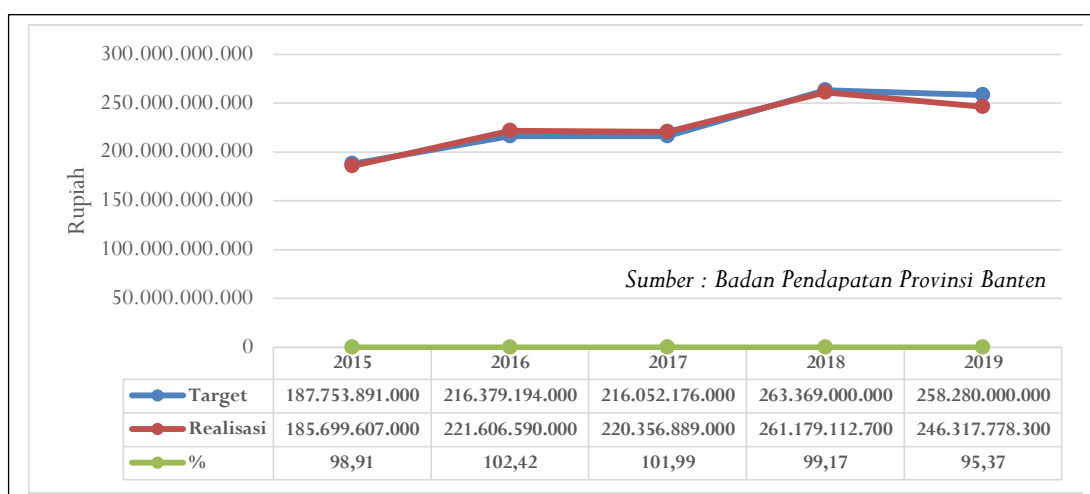
Capaian Target dan Realisasi Penerimaan BBNKB Pada UPT Serpong

Realisasi penerimaan BBNKB UPT Serpong mengalami fluktuasi, namun masih dalam katagori sangat efektif, target tidak tercapai pada tahun 2015 (98,91%), tahun 2018 (99,17%) dan tahun 2019 (95,37%). Penerimaan terendah berada pada tahun 2015 sebesar Rp. 185,699,607 dan tertinggi berada pada tahun 2018 dengan penerimaan sebesar Rp.261,179,112,700. Loncatan kenaikan terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 35,906,983,000 (19,34%). Dan pada tahun 2018 sebesar Rp. 40,822,223,700 (18,53%), sementara penurunan terjadi ditahun 2017 menurun sebesar Rp.1,249,701,000 (0,56%) dan pada tahun 2019 menurun sebesar Rp. 14,861,334,400 (5,69%)

Tabel 13. Target dan realisasi BBNKB UPT Serpong tahun 2015 s.d 2019.

Tahun	Target	Realisasi	%
2015	187,753,891,000	185,699,607,000	98.91
2016	216,379,194,000	221,606,590,000	102.42
2017	216,052,176,000	220,356,889,000	101.99
2018	263,369,000,000	261,179,112,700	99.17
2019	258,280,000,000	246,317,778,300	95.37

Sumber : Badan Pendapatan Provinsi Banten



Gambar 10. Target dan realisasi penerimaan BBNKB UPT Serpong tahun 2015 s.d. 2019.

Capaian Target dan Realisasi Penerimaan BBNKB Pada UPT Ciputat

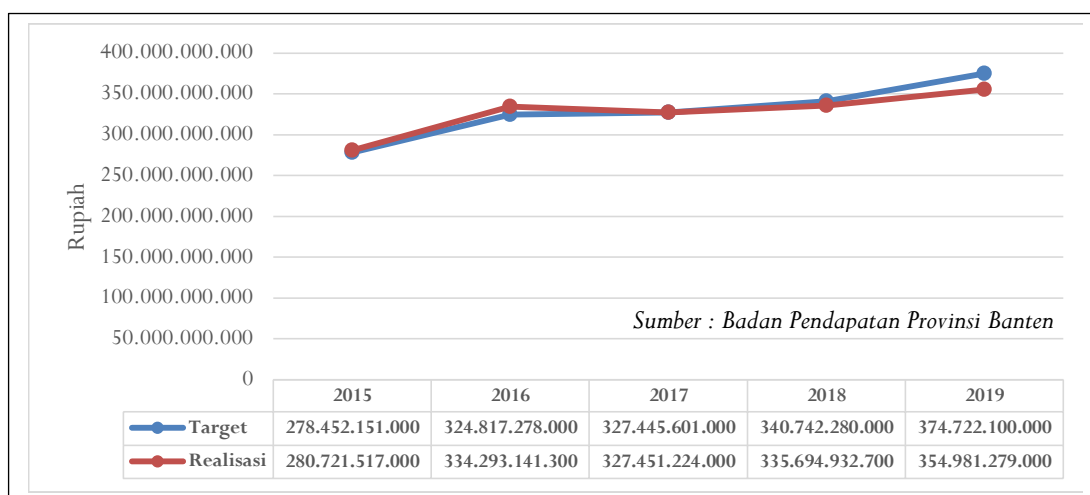
Terdapat capaian yang tidak memenuhi target penerimaan pada UPT Ciputat yaitu tahun 2018 (98,52%) dan tahun 2019 (94,73%), namun demikian semua masih dalam katagori sangat efektif . Realisasi penerimaan terendah terjadi tahun 2015 sebesar Rp. 280,721,517,000 dan penerimaan tertinggi tahun 2019 sebesar Rp. 354,981,279,000.

Tabel 14. Target dan realisasi BBNKB UPT Ciputat tahun 2015 s.d 2019.

Tahun	Target	Realisasi	%
2015	278,452,151,000	280,721,517,000	100.81
2016	324,817,278,000	334,293,141,300	102.92
2017	327,445,601,000	327,451,224,000	100.00
2018	340,742,280,000	335,694,932,700	98.52
2019	374,722,100,000	354,981,279,000	94.73

Sumber : Badan Pendapatan Provinsi Banten

Kenaikan penerimaan terbesar terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 53,571,624,300. (19,08%), namun pada tahun 2017 terjadi penurunan penerimaan sebesar Rp. 6,841,917,300.00 (2,05%).



Gambar 15. Target dan realisasi penerimaan BBNKB UPT Ciputat tahun 2015 s.d. 2019.

Metode Penetapan Target PKB dan BBNKB

UPT Bapenda belum memiliki metode secara khusus yang digunakan dalam menetapkan target PKB atau pun BBNKB. Adapun proses penetapan target diawali dengan adanya pembahasan usulan target bersama Bapenda dengan mempertimbangkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, kemudian setelah keputusan diperoleh Bapenda melanjutkan pembahasan PAD (termasuk PKB/BBNKB) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Selanjutnya TAPD melakukan pembahsan PAD bersama Tim Anggaran DPRD Provinsi Banten sampai diperoleh kesepakatan. Kesepakatan ini yang kemudian ditetapkan sebagai target.

Pencapaian Target BBNKB lebih rendah dibanding PKB

Pencapaian target BBNKB lebih rendah dibanding PKB karena BBNKB tergantung pada pembelian kendaraan baru oleh masyarakat, sedangkan pembelian kendaraan bukan hanya tergantung pada daya beli masyarakat tapi ada faktor lain yang belum dapat diprediksi seperti selera masyarakat terhadap kendaraan baru, pilihan untuk membeli kendaraan *second*, banyaknya penyedia layanan kendaraan *online* dan banyaknya pilihan terhadap *“city car”* yang nilai BBNKB-nya lebih rendah.

Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penerimaan BBNKB di Provinsi Banten tahun 2015 dan 2019, adapun temuan yang didapat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas pencapaian target BBNKB semua UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten masuk dalam katagori sangat efektif dengan kisaran antara 94,21% sampai dengan 112,39%.
2. Terdapat 4 UPT yang tidak mencapai target pada tahun 2019, yaitu :
 - 1) UPT Cikokol, realisasi penerimaan 94,21%
 - 2) UPT Ciledug, realisasi penerimaan 95,72%
 - 3) UPT Serpong, realisasi penerimaan 95,37%
 - 4) UPT Ciputat, realisasi penerimaan 94,73%
3. Hanya terdapat 2 UPT dari 11 UPT yang selalu mencapai target dari tahun 2015 sampai tahun 2019, yaitu UPT Cikande dan Balaraja.
4. Hanya terdapat 1 UPT yang selalu mencapai target dan terus meningkat realisasi penerimaannya , yaitu UPT Balaraja dengan rata-rata penerimaan sebesar Rp. 526,943,236,200 dan rata-rata kenaikan penerimaan Rp. 48,303,356,875.
5. Kontribusi terendah berasal dari UPT Malingping dengan besaran kontribusi antara Rp. 14.079.408.000 sampai dengan Rp. 24.269.680.000 dan kontribusi tertinggi berasal dari UPT Balaraja dengan besaran kontribusi antara Rp.452.103.116.000 sampai dengan Rp. 645.316.543.500.
6. UPT yang mengalami penurunan penerimaan dari tahun sebelumnya yaitu :
 - 1) UPT Pandeglang terjadi pada tahun tahun 2016 penerimaan menurun sebesar Rp.455.595.000 (0,83%) dari tahun 2015, kemudian tahun 2017 bertambah besar lagi menurunnya dari tahun 2016 sebesar Rp. 5.763.089.500(10,54%)
 - 2) UPT Rangkasbitung pada tahun 2016 penerimaan menurun sebesar Rp. 1.081.656.500 (2,60%) dibanding tahun 2015
 - 3) UPT Malingping pada tahun 2016 penerimaan menurun sebesar Rp. 1.706.644.000 (10,58%) dari tahun 2015. Kemudian tahun 2017 penerimaan menurun sebesar Rp.344.407.000 (2,39%) dari tahun 2017.
 - 4) UPT Cilegon pada tahun 2019 penerimaannya menurun sebesar Rp. 1.052.567.000 (0,98%) dari tahun 2018.
 - 5) UPT Serpong pada tahun 2017 penerimaannya menurun sebesar Rp. 1.249.701.000 (0,56%) dari tahun 2017. Kemudian pada tahun 2019 penerimaan menurun lebih besar lagi yaitu Rp. 14.861.334.400 (5,69%) dari tahun 2018.
 - 6) UPT Ciputat pada tahun 2017 penerimaan menurun sebesar Rp.6.841.917.300 (2,05%) dari tahun 2016
7. Belum ada metode penetapan target BBNKB yang secara khusus digunakan oleh UPT .
8. Capaian target BBNKB lebih rendah dibanding PKB karena tergantung pada pembelian baru, sedangkan pembelian mobil baru bukan hanya tergantung pada LPE, akan tetapi tergantung pula pada selera masyarakat terhadap model/jenis mobil baru, adanya kemudahan pilihan dalam membeli mobil *second*, serta maraknya layanan kendaraan *online*.

Rekomendasi

Agar realisasi penerimaan pada tahun-tahun mendatang dapat mencapai target, ada beberapa rekomendasi yang penulis sampaikan, yaitu:

1. Merumuskan metode penetapan BBNKB tiap UPT sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya masing-masing.
2. Melakukan penelitian lebih lanjut terhadap UPT yang tidak mencapai target pada tahun 2019 yang semuanya berada di wilayah Polda Metro Jaya.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Kepala Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Banten yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian. Kemudian, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten dan Para Kepala UPT serta Pejabat di lingkungan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten.

Daftar Referensi

- Anggraini, D. 2010. Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah: Studi Empiris pada Provinsi Bengkulu. SKripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

- Halim, A. 2004. Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, Edisi revisi. Yogyakarta. Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN.
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. ANDI, Yogyakarta.
- Miles, Matthew B., dan Huberman, A. Michel, *Qualitative Data Analysis*. Sage Publication Ltd. 1984
- Mokoginta, N.C. 2015. Analisis Efektivitas Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Peningkatan PAD Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, Vol.3 No.1 Hal .685-694
- Rosalina, F. A. 2008. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah setelah Otonomi Daerah: Studi Kasus pada Pemerintah Kepulauan Riau. Thesis, Sanata Dharma University.
- Sari, T.M. 2013. Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah (Studi Kasus pada DPPAD Provinsi Jawa Tengah). Skripsi. Universitas Dian Nuswantoro, Semarang.
- Siagian, S.P. 2014. Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara, Jakarta.

Peraturan-Peraturan

- Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
- Peraturan Gubernur Banten Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;
- Peraturan Gubernur Banten Nomor 82 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah;
- Peraturan Gubernur Banten Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2019;
- Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Daerah Provinsi Banten;
- Peraturan Gubernur Banten Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Penghapusan Sanksi Administratif Atas Keterlambatan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
- Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Dan Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Mutasi Masuk Dari Luar Daerah Dan Mutasi Dalam Daerah;
- Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, Jo Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Jo Undang-Undang Nomer 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.